

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PARTISIPASI,
TRANSPARANSI, RESPONSIF, EFEKTIFITAS EFESIENSI PADA DINAS
SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN**

(Skripsi)

Oleh

OKTIA NITA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PARTISIPASI, TRANSPARANSI, RESPONSIF, EFEKTIFITAS EFESIENSI PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

Oleh

OKTIA NITA

Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik seharusnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Konsep *good governance* ini muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penerapan prinsip *good governance* ini dilakukan karena selama ini kinerja pemerintahan yang dilakukan masih kurang efektif terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. Salah satu masalah yang ada adalah kurang efektifnya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan/pembinaan anak jalanan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan dan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Partisipasi pihak yang terkait dalam pembinaan anak jalanan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pada prinsip Transparansi Kegiatan pembinaan anak jalanan sudah memenuhi syarat transparansi berupa keterbukaan informasi tentang pencegahan dan pembinaan anak jalanan serta penyampaian informasi tentang Undang – Undang Perlindungan dan Eksploitas Anak melalui pembuatan banner dan baliho. Prinsip Responsif merupakan Kegiatan pencegahan dan pembinaan anak jalanan sudah mendapat respon dari pihak terkait seperti Dinas Sosial, Rumah Singgah, Sat Pol PP, anak Jalanan itu sendiri dan insan Pers dalam hal penyampaian informasi ke publik sedangkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pembinaan anak jalanan kurang optimal hal ini terkendala dengan adanya hambatan – hambatan berupa anak jalanan yang berada di rumah singgah belum sepenuhnya meninggalkan pekerjaan lamanya. Tapi kendala ini menjadi tantangan ke depan Dinas Sosial dan stake holder lainnya dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF PARTICIPATION, TRANSPARANCY, RESPONSIVENESS, EFFICIENCY EFFECTIVENESS ACTION TO EMPOWERING STREET CHILDREN OF DINAS SOCIAL BANDAR LAMPUNG CITY

By

OKTIA NITA

Bandar Lampung in ensuring good governance should apply the principles of good governance. The concept of good governance emerged due to dissatisfaction with the government's performance as previously believed penyelenggara public affairs. Application of the principle of good governance is done because during the performance of the government who do are less effective, especially in the field of social welfare. One problem of Bandar Lampung that to empowering street children

The purpose of this study was to determine the application of the Principles of Good Governance In Dinas Sosaial Kota Bandar Lampung to empowering Street Children and to find other forms of empowerment of street children who do Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

The results showed that the principle of participation of stakeholders in the development of street children is in accordance with the duties and responsibilities. On the principle of transparency coaching activities of street children already eligible transparency in the form of disclosure of information about prevention and the development of street children as well as the delivery of information about the Act - the Child Protection Act and exploitation through the creation of banners and billboards. Principle Responsive an activity of prevention and formation of street children had received a response from relevant parties such as Dinas Social, Sat Pol PP, children Street itself and human Releases in dissemination of information to the public, while the principle of effectiveness and efficiency in implementation of prevention activities and coaching street children less than optimal it is constrained by the existence of barriers - barriers in the form of street children in shelter homes has not completely left the old job. But this obstacle challenge for the future of Social Service and other stakeholders in solving the problems of street children.

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PARTISIPASI,
TRANSPARANSI, RESPONSIF, EFEKTIFITAS EFESIENSI PADA DINAS
SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik**

Oleh

OKTIA NITA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PARTISIPASI, TRANSPARANSI, RESPONSIF, EFEKTIFITAS EFESIENSI PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN**

Nama Mahasiswa

: **Okta Nita**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1016021128

Jurusan

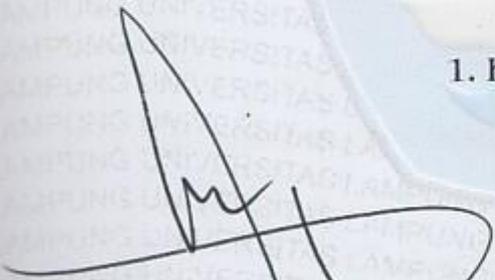
: Ilmu Pemerintahan

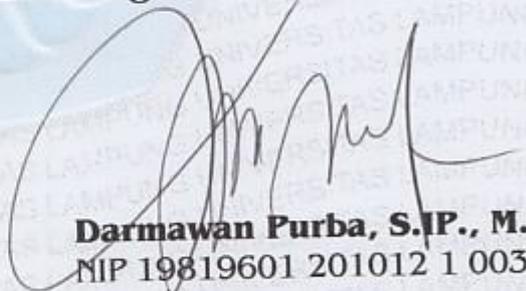
Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

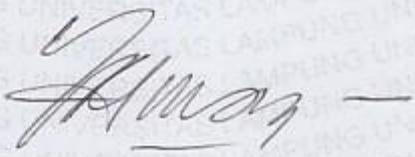
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Aman Toto Dwijeno, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 19819601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

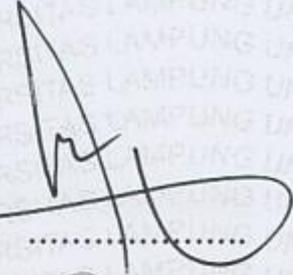

Drs. R. Sigit Krisbiantoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

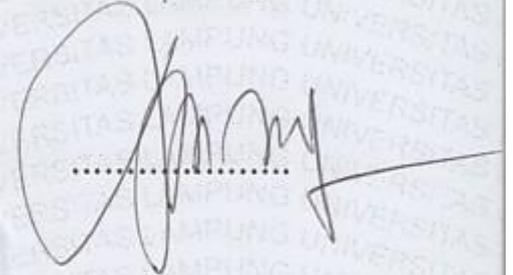
Ketua

: **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



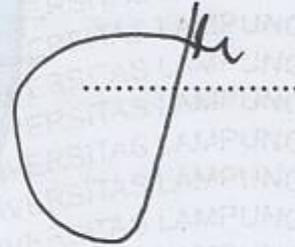
Sekretaris

: **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



Penguji Utama

: **Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.**

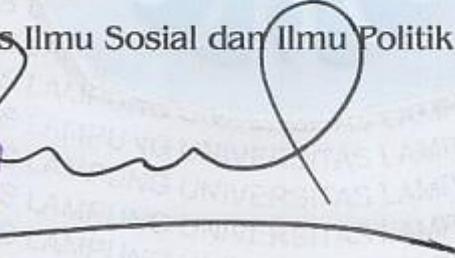


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya, M.Si.

NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **8 Desember 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Febuari 2017



Oktia Nita

NPM. 1016021128

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 28 Oktober 1992, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Hasan Badri dan Ibu Ferialina.

Jenjang pendidikan formal penulis diawali dari TK. Darma Wanita Kota Bandar Lampung pada tahun 1997 dan lulus - pada tahun 1998, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Harapan Jaya Kota Bandar Lampung pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2004. Pendidikan selanjutnya ialah pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007, serta penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis melibatkan diri pada dalam beberapa organisasi kemahasiswaan dan beberapa pelatihan internal kampus yakni:

1. Sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan pada tahun 2010.
2. Sebagai anggota LSSP Cendikia tahun 2010.
3. Sebagai peserta Latihan Kepemimpinan pada tahun 2010.

4. Sebagai peserta dalam acara SDP (*Self Development Program*) dengan tema “Lejitkan Potensi Diri Untuk Menuju Generasi Rabbani”, yang diselenggarakan oleh Forum Studi Pengembangan Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2010.
5. Sebagai peserta dalam kegiatan Symposium Nasional yang bertema “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah”, yang diselenggarakan oleh HMJ Ilmu Pemerintahan Unila pada tahun 2011.
6. Sebagai peserta pada Seminar Nasional yang bertema “Reformasi Birokrasi di Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”, yang diselenggarakan oleh Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (LABPOLOTDA) Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung pada tahun 2011.
7. Sebagai peserta dalam acara Talk Show yang bertema “Penulis Muda: Menjadi Orang Besar Melalui Tulisan”, yang diselenggarakan oleh LSSP Cendikia dan HIMADIPPUS SISIP Universitas Lampung pada tahun 2012.

MOTTO

**Man jadda Wa Jadda
(Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan)**

**Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain , dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.
(Q.S. Al Insyrah: 5-7)**

**Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua
(Aristoteles)**

**Keberhasilan atau kegagalanmu, tergantung pada seberapa kuat ikhtiar yang kamu lakukan
(Oktia Nita)**

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta yang telah memberikan nikmat iman, islam, kesehatan jasmani dan rohani , memberikan akal sehat dan semangat untuk senantiasa berikhtiar.

Solawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Aku persembahkan karya sederhana ini untuk....

Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tersayang yang selalu mendoakanku dalam setiap langkahnya, yang selalu memotivasi mengarahkan, menuntun, dan membimbing setiap langkah dan tujuanku, yang selalu mengajarkanku arti sebuah kehidupan untuk terus bersabar dan bersyukur.

Terima kasih telah mengajarkanku arti sebuah perjuangan, semoga cinta dan kasih sayang serta tetesan keringat dan air mata yang tercurah untukku mendapat balasan surga dari-Nya.

Aamiin Allah Humma Aamiin.

Kakak-kakakku tersayang, M.Taufik Hasan dan Sanferita Siska, yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar aku menjadi orang yang tidak pantang menyerah. Terimakasih selalu menjadi penyemangat setiap perjuanganku.

Almamaterku tercinta”Universitas Lampung”

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sesungguhnya hanya kepada Allah kita bersyukur, karena Dia maha Pemberi Pertolongan dan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada seluruh makhluk-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan terbaik yakni Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi persyaratan akademik, yakni ujian komprehensif pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata I Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan nasihat, semangat, dan motivasi dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP.,M.IP selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membantu terselesaikannya skripsi ini, serta selalu memberikan pencerahan, nasihat, serta semangat pada setiap proses bimbingan.
5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku penguji utama yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini dan juga telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si yang telah memberikan waktu, nasehat serta bimbingannya.
7. Bapak Maulana Mukhlis, S.SOS.,M.IP selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta nasihat dalam proses pembimbingan akademik.
8. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu di setiap mata kuliahnya.
9. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu yang selalu menjadi motivator dan sahabat terbaik dalam hidupku, selalu mendoakan, mengarahkan, menuntun, menyemangati, serta selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tidak tergantikan oleh siapapun.

10. Kakak-kakakku, M.Taufik Hasan dan Sanferita Siska, terimakasih telah memberi doa, semangat, dan dukungannya kepadaku. Terima kasih juga untuk kakak iparku Simpulan Fina dan keponakanku Azzahra sudah memberikan doa dan semangat untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan, Dwi Haryanti, Novia Belladina, dan Shiawlin Ratu Ajeng, yang selalu kompak dan selalu bersama- sama setiap harinya berjuang menuntaskan mata kuliah demi mata kuliah. Anggi Dwi Pramono yang selalu memberikan data dan informasi skripsi dan teman pada saat bimbingan. Terimakasih atas semua keceriaan yang kalian ukir di dalam hatiku.
12. Teman- teman KKN di Desa Kedaton Induk, Lampung Timur: Ngudi, Fery, Ariken, Putu, Dewi, Ara, Hesty, Ulya dan Dodi, yang selalu memberikan keceriaan di setiap harinya pada saat KKN.
13. Sahabat-Sahabat sehatiku, Febby, Yunis dan Foila, Budi, Yurike, Dinda, Novrico, dan teman-teman seangkatan ilmu pemerintahan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan serta motivasinya.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang <i>Good Governance</i>	9
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	9
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	13
3. Elemen-Elemen <i>Good Governance</i>	16
B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Anak Jalanan.....	19
1. Pengertian Pemberdayaan.....	19
2. Pengertian Anak Jalanan.....	34
3. Upayah Pemberdayaan Anak Jalanan.....	36
C. Kerangka Pikir.....	38

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	42
B. Fokus Penelitian.....	42
C. Jenis Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Informan	46
F. Teknik Pengolahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data	47

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Sosial Bandar Lampung.....	49
B. Struktur Organisasi Dinas Sosial Bandar Lampung.....	51
C. Data Kepegawaian.....	55
D. Gambaran Umum Anak Jalanan.....	55

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Prinsip Partisipasi.....	57
2. Penerapan Prinsip Transparansi.....	60
3. Penerapan Prinsip Responsif.....	61
4. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi.....	65
B. Pembahasan.....	65
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Perbedaaistilah <i>government</i> dan <i>governance</i>	46
2. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2015.....	51
3. <i>Stake holder</i> Penanganan Anak Jalanan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam kaitannya dengan konsepsi *Good Governance* (kepemerintahan yang baik), maka secara konseptual pengertian kata “*good*” dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung dua pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga interaksi yang baik diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Konsep *Good governance* menurut UNDP dalam Sedarmayanti, terdapat prinsip-prinsip *good governance* yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi *participation* (Partisipasi), *Rule of Law* (Aturan Hukum), *Transparency* (Transparansi), *Responsiveness*

(Daya Tanggap), *Consensus orientation* (Berorientasi consensus), *Equity* (Berkeadilan), *Efectiveness and efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi), *Accountability* (akuntabilitas), dan *Strategic vision* (Visi strategis).

Namun di dalam penulisan ini penerapan prinsip *good governance* lebih menekankan pada prinsip partisipasi, transparansi, responsif, efektifitas dan efisiensi. Beberapa prinsip *good governance* ini di pilih penulis berdasarkan beberapa alasan yaitu pertama, memilih transparansi dimana penulis ingin meneliti apakah ada lembaga lain yang ikut serta berpartisipasi membantu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan. Kedua, alasan memilih prinsip transparansi, penulis ingin meneliti apakah sudah tersedianya informasi yang memadai dan mudah di akses oleh masyarakat umum terhadap setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan program pemberdayaan terhadap anak jalanan. Ketiga, alasan memilih prinsip responsif yaitu penulis ingin meneliti bagaimana daya tanggap Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani langsung masalah anak jalanan dan Alasan keempat memilih prinsip efektifitas dan efisiensi yaitu penulis ingin meneliti apakah kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan baik dalam pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana sudah sesuai dan tepat waktu. Berdasarkan alasan beberapa prinsip di atas, dapat di lihat apakah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah menerapkan ke empat prinsip *good governance* tersebut atau belum sehingga dapat di tarik kesimpulan apakah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan sudah dapat di katakan *good governance* atau bahkan jauh dari kata *good governance*.

Adapun pengertian beberapa prinsip *good governance* yang terdiri dari prinsip partisipasi, transparansi, responsif, efektifitas dan efisiensi. Prinsip partisipasi yaitu adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. Prinsip transparansi yaitu adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Prinsip responsif adalah daya tanggap/tanggapan seseorang terhadap fenomena yang sudah terjadi ataupun fenomena yang akan terjadi, lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*. Sedangkan prinsip efektifitas dan efisiensi merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektifitas berfokus pada akibat, pengaruh atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.

Upaya perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka penerapan prinsip *good governance* harus dilakukan bagi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sejalan dengan ini Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik seharusnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Konsep *good governance* ini muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penerapan prinsip *good governance* ini dilakukan karena selama ini kinerja pemerintahan yang dilakukan masih kurang efektif terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. Salah satu masalah yang ada adalah kurang efektifnya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan/pembinaan anak jalanan. Sebenarnya permasalahan anak jalanan ini bukanlah persoalan yang baru. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya anak jalanan

sehingga permasalahan ini perlu sekali untuk diperhatikan, karena keberadaan mereka menjadi cerminan kemiskinan dan cukup mengganggu pemandangan perkotaan. Pertumbuhan jumlah anak jalanan merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah sehingga menimbulkan jumlah angka kriminalitas juga ikut bertambah.

Berikut data anak jalanan di Kota Bandar Lampung tahun 2011-2013:

Anak Jalanan	2011	2012	2013
	80 orang	86 orang	27 orang

Sumber: Dokumen kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, tahun 2013.

Banyaknya anak yang seharusnya mendapat kasih sayang dari orang tua telah melangkah jauh menjadi anak jalanan. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan budaya yang bergeser semakin jauh menyimpang. Fenomena merebaknya anak jalanan telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat para pengguna jalanan. Hampir di setiap jalan selalu melihat dan menyaksikan anak jalanan yang memberikan citra buruk, dan merusak keindahan Kota Bandar Lampung. Masih kurang efektifitas dan efisiensi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberdayaan anak jalanan, yang mana dapat dengan mudahnya menemukan anak jalanan di lampu lalu lintas, *halte* dan tempat-tempat lain yang menjadi titik maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan UUD 1945 secara tegas dan jelas telah memberikan tugas kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak terlantar bahkan mereka berada di bawah tanggung jawab pemerintah, hal ini sesuai dengan pasal

34 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pemerintah perlu melakukan upaya dalam pemberdayaan anak jalanan, sebagai salah satu wujud kesejahteraan sosial. Dinas Sosial adalah dinas yang mengatasi masalah-masalah sosial seperti masalah kesejahteraan sosial, yaitu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadinya masalah sosial seperti munculnya anak jalanan. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan unsur pemerintah daerah yang memiliki fungsi dan tata kerja dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang kesejahteraan sosial, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum. Hal ini tertera pada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 15 tahun 2008.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung perlu bertindak melakukan upaya yang lebih lagi dalam pemberdayaan anak jalanan sehingga anak-anak jalanan yang tidak berdaya dalam perekonomian, pendidikan, agama, moral, sosial, dan lain-lainnya dapat teratasi dan sejahtera. Walikota sebenarnya telah membuat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Pada pasal 11 berbunyi adanya usaha rehabilitasi pemberdayaan/pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bagi anak jalanan usia sekolah seperti bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan pra sekolah, dan bantuan stimulan beasiswa dan peralatan sekolah.

Adapun program yang sudah dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengatasi anak jalanan, terbagi ke dalam tiga tingkatan antara lain secara langsung, secara lembaga, dan secara instansi dinas. Data ini penulis dapat pada

saat pra-riset dan mewawancarai salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Program tersebut yaitu secara langsung Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melakukan monitoring kelapangan dalam menangani anak jalanan, secara lembaga Dinas Sosial membentuk grup vokal bagi anak jalanan, dan secara instansi dinas, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, merazia anak jalanan yang mencari perekonomian di jalanan, selanjutnya mengembalikannya kepada keluarganya dan memberi *sanksi* serta memasukkan ke panti rehabilitasi bagi anak jalanan yang masih kembali melakukan pekerjaan di jalanan.

Perlu adanya bimbingan khusus yang memadai dan terarah serta menarik bagi mereka anak jalanan, agar anak jalanan tidak menganggap bila hidup di jalanan adalah suatu cara untuk mendapatkan uang dengan mudah dan tanpa bekerja keras. Padahal, hidup di jalanan tidaklah mudah bagi seorang anak apalagi yang masih di bawah umur. Berbagai persoalan dan kekerasan sering terjadi, seperti perkosaan dan perkelahian antara anak jalanan. Aspek pendidikan yang seharusnya dipenuhi pada masa anak-anak menjadi terabaikan. Padahal, pendidikan merupakan unsur terpenting dalam menentukan harkat dan martabat suatu bangsa. Pada titik ini, maka upaya pemberdayaan anak jalanan tidak mungkin tanpa kerjasama. Oleh sebab itu, tidak harus terkait anak jalanan ditangani sendiri oleh Dinas Sosial. Anak jalanan sebagai masalah sosial yang tinggi sehingga tidak mungkin dimonopoli satu instansi, pemenuhan hak anak terutama anak jalanan harus melibatkan serta merupakan tanggung jawab berbagai instansi. Mereka yang berurusan dengan kesehatan, pendidikan, agama, dan tenaga kerja perlu dilibatkan. Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

dan masyarakat juga perlu untuk dilibatkan dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan penulis melihat masih banyaknya anak jalanan di sebagian besar Kota Bandar Lampung. Hal ini membuat penulis ingin meneliti tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* dan bentuk-bentuk upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan/pembinaan anak jalanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan.
2. Mengetahui Bentuk-Bentuk Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Yang Dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah khasanah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, pegawai, dan dosen sebagai salah satu kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance* pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan anak jalanan.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani langsung tentang masalah pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Menurut Ndraha (2003: 69) *governance* berasal dari kata kerja Inggris *gover* (memerintah) berasal dari kata lain *gubernare* atau *gerik kybernan*, artinya mengemudikan (sebuah kapal), jadi “memerintah” disini berarti mengemudikan. Kata bendanya adalah *governance* (latin: *governantia*), menunjukkan metode atau sistem mengemudi atau manajemen organisasi. Istilah *governance* dan *government* adalah dua pengertian yang berbeda. Kata kerja *gover* digunakan dilapangan politik, kata bendanya *government*, *governance* lebih sebagai gejala sosial, sedangkan *government*, gejala politik.

Dewasa ini ada kecenderungan untuk mengembalikan makna pemerintahan dari *government* ke *governance* (yang lebih luas), sekurang-kurangnya menghidupkan kembali konsep *governance*, *government* dapat diartikan pemerintah dan dapat juga diartikan pemerintahan. Wasistiono membedakan istilah *governance* dan *government* dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Perbedaan Istilah *Government* dan *Governance*

No.	Unsur Perbandingan	Kata <i>Government</i>	Kata <i>Governance</i>
1.	Pengertian-pengertian badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh organ tertinggi dalam suatu negara, cara pengguna, atau pelaksana	Badan/lembaga atau fungsi yang dijadikan oleh organ tertinggi dalam suatu negara	Cara, penggunaan, atau pelaksana

2.	Hubungan	Hirarkis yang memerintah diatas, yang diperintah dibawah	Hirarkis, kesetaraan, kedudukan dan hanya berada dalam fungsi
3.	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu yaitu instansi pemerintah	Sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat
4.	Pemegang peran dominan	Sektor pemerintah	Semua komponen memegang peranan sesuai fungsi masing-masing
5.	Efek in pact yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6.	Hasil (output) yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara	Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi warga negara dan warga masyarakat

Sumber: Syarif Makhya (2004: 61)

Menurut Ashari dan Fernanda (2001: 52) istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, melainkan :

“*Governance* mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan, tidak mengherankan apabila terdapat istilah *publik governance private governance, corporate governance* dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Good governance dalam Ashari dan Fernanda (2001: 53) menjelaskan kembali

bahwa konsep pemerintahan (*governance*) mencakup beberapa metode yaitu :

“*Governance* merupakan metode yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Konsep ini juga meliputi mekanisme, proses dan kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, memenuhi hak-hak hukum, memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara, dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara sesama”.

Menurut Bank Dunia (dalam Dwipayana, 2003) *governance* sebagai tindakan pemegang kekuasaan untuk mengelola urusan nasional. *Governance* juga bisa diartikan sebagai pengelolaan struktur rezim dengan sebuah pandangan untuk memperkuat legitimasi penyelenggaraan kekuasaan dimata kehidupan publik.

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Sedarmayanti (2004: 3) mengandung dua pemahaman :

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada :

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Good governance menurut Sinambela (2011: 47) diartikan suatu proses yang mengorientasikan pada kepentingan publik sebagai tujuan utama. *Good*

governance diartikan sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

Sedangkan menurut UNDP (dalam Sedarmayanti 2012) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penerapan prinsip *good governance* pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan/pembinaan anak jalanan diperlukannya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi mencapai tujuan tertentu sesuai dengan definisi dari *good governance* dengan menjaga interaksi yang baik diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Bhatta (dalam Sedarmayanti 2012) unsur utama *good governance* yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum, Kompetensi Manajemen dan Hak-Hak Azasi Manusia.

Prinsip-prinsip *good governance* menurut ADB (*Asian Development Bank*) adalah: Akuntabilitas, Transparansi, Kebijakan dapat diprediksi, dan Partisipasi.

(http://www.transparansi.or.id/agenda/agenda2/seri_dialog/dialog-32.html.)

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas (dalam Sedarmayanti 2012), prinsip-prinsip *good governance* yaitu:

- a. Birokrasi yang professional, yaitu berkinerja tinggi, taat azas, kreatif dan inovatif, serta memiliki kualifikasi di bidangnya.
- b. Partisipasi masyarakat, yaitu adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses/metode partisipatif dan adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
- c. Tegaknya supremasi hukum, yaitu adanya kepastian dan penegak hukum, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, dan adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- d. Transparansi, yaitu tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik dan adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
- e. Daya Tanggap (responsif), yaitu tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.

- f. Berorientasi pada konsensus (kontrol), yaitu meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain).
- g. Kesenjangan, yaitu berkurangnya kasus diskriminasi, meningkatnya kesetaraan gender.
- h. Efektivitas dan efisiensi, yaitu terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, adanya perbaikan berkelanjutan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
- i. Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, dan meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.
- j. Visi Strategis, yaitu adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum, adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan, dan adanya dari pelaku untuk mewujudkan visi.

(dalam http://www.bappenas.go.id/introction_gg.asp.htm).

Menurut UNDP (dalam Sedermayanti 2012) karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut :

a. Participation.

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. *Rule of law.*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.

c. *Transparency.*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

d. *Responsiveness.*

Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder*.

e. *Consensus orientation.*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

f. *Effectiveness and efficiency.*

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

g. *Accountability.*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*.

Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

h. *Strategic vision.*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang telah diuraikan menurut beberapa para ahli di atas, selanjutnya dapat disimpulkan dan ditekankan bahwa terdapat beberapa prinsip utama *good governance* yang sesuai serta dapat diterapkan pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan/pembinaan anak jalanan. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas dasar prinsip partisipasi, transparansi, responsif, efektivitas dan efisien yang mana prinsip-prinsip ini menjadi faktor-faktor pendukung Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan/pembinaan anak jalanan sesuai dengan gambaran dan definisi pemerintahan yang baik.

3. Elemen-Elemen *Good Governance*

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh sebab itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2012: 4-5) dari segi fungsional, aspek *governance* dapat di tinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi efektif dan terjadi inefisiensi. Berdasarkan definisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki, yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi pada *equite, poverty*, dan *quality of live*.
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu, institusi *governance* meliputi tiga elemen yang melibatkan kepentingan publik. Elemen-elemen tersebut adalah :

a. Negara

1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil
2. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
3. Menyediakan public service yang efektif
4. Menegakkan HAM
5. Melindungi lingkungan hidup
6. Mengurus standar kesehatan dan standar kesejahteraan publik

b. Sektor Swasta

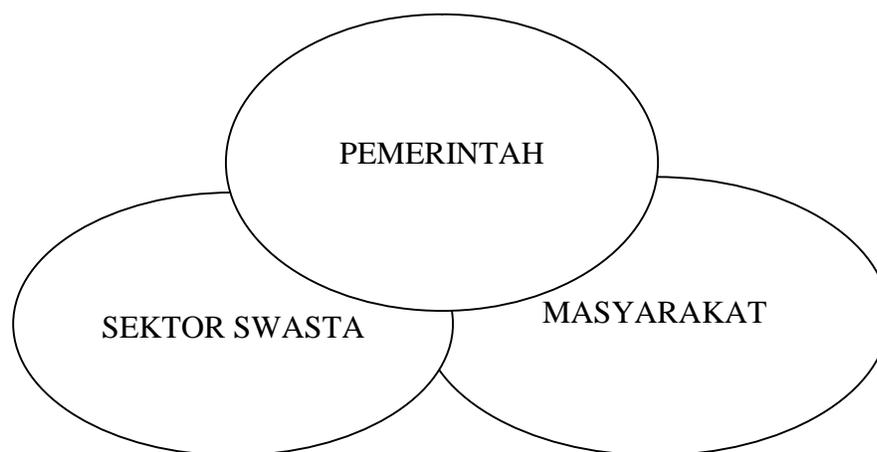
1. Menjalankan industry
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Menyediakan insentif bagi karyawan
4. Meningkatkan standar hidup masyarakat
5. Memelihara lingkungan hidup

6. Menaati peraturan
7. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
8. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

c. Masyarakat

1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
2. Mempengaruhi kebijakan publik
3. Sebagai sarana checks and balances pemerintah
4. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintahan
5. Mengadakan SDM
6. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Good governance bukan semata-mata mencakup relasi dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi kerjasama dan sejajar antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Hubungan antara ketiga komponen/elemen di atas secara jelas dapat digambarkan dan dilihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 1 : Interaksi Antara Pelaku Dalam Rangka Kepemerintahan

Sumber : Sedarmayanti (2012: 5)

Elemen-elemen *good governance* dari beberapa uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kesejajaran antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (*society*) merupakan elemen penting dalam rangka pemerintahan. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan upaya pemberdayaan/pembinaan anak jalanan dalam penelitian ini memerlukan interaksi kerja sama dari ketiga elemen *good governance*. Ketiga elemen tersebut mengandung arti akan pentingnya peran dan hubungan interaksi antara pelaku dalam rangka menerapkan pemerintahan yang baik demi mencapai tujuan nasional mensejahterakan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut sebagai konsep mengupayakan pemecahan masalah anak jalanan secara berencana dalam konteks memberikan perlindungan dan hak-hak anak jalanan melalui upaya pemberdayaan/pembinaan anak jalanan.

B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Anak Jalanan

1. Konsep Pemberdayaan

Kata pemberdayaan (*empower*) menurut Webster (dalam Sedarmayanti 2012) mengandung dua arti. Pertama adalah *to give power or authority to*. Kedua berarti *to give ability or enable*. Pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Mengutip definisi pemberdayaan dari Ife (1995: 182) Pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/peluang, pengetahuan

dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri”. Ife juga menambahkan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari mereka yang tidak beruntung.

(<http://ciptamukti.blogspot.com/2011/12/pemberdayaanmasyarakat.html?m=1>).

Sedangkan menurut Paul (dalam Sedarmayanti 2012) menyatakan bahwa pemberdayaan disebutkan sebagai upaya menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan dan peningkatan kemandirian, lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta mempebesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil pembangunan”.

Suharto (2005) mengungkapkan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang/kelompok/masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan, b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

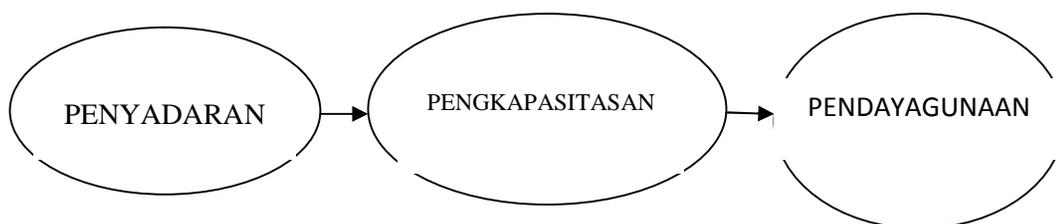
Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Masyarakat yang tidak berdaya diberi ilmu pengetahuan, kesempatan bertindak, sehingga mereka merasa mampu dan merasa pantas untuk dilibatkan. Kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kedua kecenderungan ini saling terkait kadangkala keduanya bertukar posisi dalam prosesnya (Pranarka dan Vidhyandika, 1996 dalam Hikmat, 2006).

Menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007) pemberdayaan merupakan sebuah proses sehingga mencakup tahapan-tahapan yang terbagi atas :

1. Tahap penyadaran merupakan tahap dimana target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mencapai “sesuatu”. Misalnya pemberian pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief*, dan *healing*. Intinya target dibuat mengerti bahwa mereka perlu berdaya yang dimulai dari dalam diri mereka sendiri.
2. Tahap kedua yaitu “*capacity building*” atau pengkapasitasan, memampukan atau *enabling*. Target harus mempunyai kemampuan terlebih dahulu sebelum mereka diberikan daya atau kuasa. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia misalnya training (pelatihan), workshop (loka latih), dan seminar. Pengkapasitasan organisasi dilakukan

dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Namun pengkapasitasan organisasi ini jarang dilakukan karena ada anggapan apabila pengkapasitasan manusia sudah dilakukan maka pengkapasitasan organisasi akan berlaku dengan sendirinya. Jenis yang ketiga adalah pengkapasitasan sistem nilai. Sistem nilai adalah “aturan main”. Dalam cakupan organisasi sistem nilai berkenaan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, atau sistem dan prosedur. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan *good governance*. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan membuatkan “aturan main”. Pengkapasitasan ini jarang dilakukan juga karena sama dengan pengkapasitasan organisasi ada stereotype bahwa pengkapasitasan ini dapat terbentuk dengan sendirinya setelah pengkapasitasan manusia.

3. Tahap yang terakhir adalah pemberian daya atau “empowerment” dalam makna sempit. Target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kapasitas kecakapan yang telah dimiliki.



Gambar 1. Tahapan Pemberdayaan (Wrihatnolo dan Dwijowijoto ,2007)

Pemberdayaan merupakan proses pemetaan dari hubungan atau relasi subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya (kuasa) (*flow of power*) dari subyek ke obyek.

Dalam pengertian yang lebih luas, mengalirnya daya ini merupakan upaya atau cita-cita untuk mensinerjikan masyarakat miskin ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah “beralihnya fungsi individu atau kelompok yang semula sebagai obyek menjadi subyek (yang baru)”, sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar “subyek” dengan subyek yang lain. Dengan demikian, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyek-subyek (Nasution, 2006).

Berdasarkan konsep-konsep di atas, dari berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, diharapkan mereka dapat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan pokok juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan, pengetahuan dan keterampilan, serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. penyadaran pengkapasitasan pendayaan.

A. Pendampingan

Konsep pendampingan memberikan gambaran umum sebuah pendampingan bagi peneliti secara teoritis. Peneliti dapat memanfaatkannya sebagai pembanding dengan kenyataan di lapangan. Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan yang bertahan lama dapat dicapai dengan pendampingan. Begitu juga menurut Bachtiar (2009), salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Implementasi yang mampu menggerakkan dan berlangsung kontinu memerlukan adanya pendampingan.

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Oleh sebab itu, pemberdayaan melalui pendampingan ini dilakukan untuk membantu masyarakat memiliki akses terhadap pasar, teknologi yang efektif dan efisien, serta kemudahan pada sarana produksi dan sumber pembiayaan yang nantinya dapat dijadikan modal usaha. Menurut Supriatna *dalam* Sumodiningrat (1999), hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pendampingan yaitu:

1. Pembinaan penduduk miskin dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil, misalnya kelembagaan kelompok tani.
2. Kelompok yang telah terbentuk tersebut kemudian dibimbing menyusun rencana kegiatan dan rencana kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan usaha anggota.
3. Pemberian motivasi kepada anggota kelompok agar aktif menabung dengan cara menyisihkan sebagian hasil usahanya.
4. Dana yang terkumpul dari kegiatan menabung dihimpun untuk dijadikan alat bantu.

5. Pendamping membantu dalam proses pengelolaan kegiatan kelompok mulai dari penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pengawasan, dan pengembangan usaha.
6. Pembinaan kelompok untuk meningkatkan produksi, mempelajari strategi pemasaran, dan pendistribusian hasil produksi anggota kelompok.

B. Pelatihan

Kirkpatrick (1994) mendefinisikan pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan. Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling umum dan para pimpinan mendukung adanya pelatihan karena melalui pelatihan, para pekerja akan menjadi lebih trampil dan karenanya akan lebih produktif sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika pekerja sedang dilatih”.

Pelatihan menurut Strauss dan Syaless di *dalam* Notoatmodjo (1998) berarti mengubah pola perilaku, karena dengan pelatihan maka akhirnya akan menimbulkan perubahan perilaku. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori. Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2002), pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek daripada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pelatihan orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta dengan

lingkungannya yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Peserta program pemberdayaan perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan peningkatan keterampilan yang dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Menurut Garry Dessler, pelatihan memberikan seseorang keterampilan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya pendidikan dan latihan yaitu:

- a) membantu individu untuk dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah secara lebih baik;
- b) internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, tanggung jawab, dan kemajuan;
- c) mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan diri;
- d) membantu untuk mengurangi rasa takut dalam menanggapi tugas-tugas baru

(Justine Sirait, 2006)

C. Penyuluhan

Penyuluhan bukanlah sekedar penerapan tentang kebijakan penguasa, bukan hanya diseminasi teknologi, bukan program *charity* yang bersifat darurat, dan bukan program untuk mencapai tujuan yang tak merupakan kepentingan pokok kelompok sasaran. Tetapi adalah program pendidikan luar sekolah yang bertujuan memberdayakan sasaran, meningkatkan kesejahteraan sasaran secara mandiri dan membangun masyarakat madani; _pembelajaran yang berfungsi secara berkelanjutan dan tidak bersifat *ad hoc*, serta program yang menghasilkan perubahan perilaku dan tindakan sasaran yang menguntungkan sasaran dan masyarakatnya.

Penyuluhan juga merupakan pendidikan bagi pihak yang disuluh agar berubah perilakunya berusaha lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera, dan bermasyarakat lebih baik serta menjaga kelestarian lingkungannya.

Metode penyuluhan dapat diartikan sebagai cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada para anak jalanan beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mereka tahu, mau dan mampu menerapkan inovasi (teknologi baru). Sedangkan teknik penyuluhan pertanian dapat didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh sumber atau penyuluh dalam memilih serta menata isi pesan menentukan pilihan cara dan frekuensi penyampaian pesan serta menentukan bentuk penyajian pesan. (Slamet 2000). Menurut Kartasapoetra (1994) dalam Alim (2010) penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (*behavior*) yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya).

D. Perilaku

Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terbentuk dalam wujud pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain perilaku manusia merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini bersifat pasif dan aktif (tindakan: berfikir, berpendapat, bersikap). Sumardi *et al.* (1997) menyatakan bahwa perilaku seseorang terhadap keberadaan suatu obyek, dalam hal ini sumber daya.

Perilaku merupakan reaksi dari hasil interaksi antar individu dengan rangsangannya atau lingkungannya. Lutfiyah (2007) mengatakan perilaku adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh seseorang. Perilaku individu meliputi segala sesuatu yang meliputi pengetahuannya (*knowledge*) yang menjadi sikapnya dan yang bisa dikerjakan. Perilaku muncul sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya dan benar-benar dilakukan seseorang dalam bentuk tindakan. Perilaku menurut Sukanto (2000) dalam Panduwinata (2009) adalah jawaban atau tanggapan seseorang terhadap suatu keadaan. Sementara menurut Sarwono (1992), dalam Budhiarty (2004), mengartikan perilaku sebagai perbuatan-perbuatan manusia baik yang kasat mata (memukul, menendang) atau yang tidak kasat mata (sikap, minat, dan emosi).

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah reaksi atau tindakan nyata yang terjadi dari hasil interaksi dengan rangsangan atau lingkungannya dan yang benar-benar dilakukan oleh seseorang dalam bentuk tindakan. Dalam perilaku menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (1998) terbagi tiga teori yaitu :

1. Faktor-faktor predisposisi yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keterampilan, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai tradisi.
2. Faktor pemungkin adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan .Artinya faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku.
3. Faktor-faktor penguat adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku berawal dari adanya faktor-faktor yang mempermudah untuk terjadinya perilaku. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, perilaku yang akan diteliti adalah perilaku peserta dalam menerima dan melaksanakan program Posdaya.

1. Unsur-unsur Pembentuk Perilaku Peserta

Perilaku peserta pendampingan Posdaya dapat terbentuk oleh adanya fakto-faktor pendukung, yaitu faktor Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan. Adapun penjelasan dari masing-masing faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- Pengetahuan

Menurut Notoadmojo (1998), pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan/ perilaku seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih sulit untuk diubah dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Pengetahuan ini mampu dikembangkan disebabkan dua hal utama yaitu:

- a) Manusia mempunyai bahasa dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut.

b) Manusia mempunyai kemampuan berfikir menurut suatu alur kerangka tertentu. Notoadmojo (1998) membagi domain pengetahuan menjadi 6 tingkatan yaitu:

- 1) Tahu
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya termasuk kedalam tingkatan ini adalah mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu adalah tingkat pengetahuan tingkat rendah.
- 2) Memahami
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan cara benar tentang objek yang diketahui yang dapat diimplementasikan materi tersebut secara benar.
- 3) Aplikasi
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau pada kondisi yang sebenarnya.
- 4) Analisis
Analisis atau kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama yang lain.
- 5) Sintesis
Sintesis menunjukkan pada suatu komponen untuk menetapkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.
- 6) Evaluasi
Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian berdasarkan suatu kriteria-kriteria yang ada.

Penelitian tentang pengetahuan yang dilakukan oleh Rogers (1974) dalam Notoadmojo (1998) yang mengungkapkan bahwa perilaku yang didasari pengetahuan, dan sebelum orang mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut terjadi urutan proses :

- a) *Adoption*, yakni penerapan perilaku sesuai dengan pengetahuan kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.
- b) *Awareness* (kesadaran) yakni kesadaran terhadap stimulus (objek)
- c) *Evaluation* (evaluasi) perpindahan terhadap baik tidaknya stimulus bagi dirinya.
- d) *Interest* (daya tarik) terhadap stimulus atau objek tersebut.

- e) *Trial*, yakni mencoba melakukan sesuatu dengan apa yang di kehendaki oleh stimulus.

- Sikap

Sikap atau *attitude* adalah suatu konsep paling penting dalam psikologi sosial. Pembahasan yang berkaitan dengan psikologi (sosial) hampir selalu menyertakan unsur sikap baik sikap individu maupun sikap kelompok.

Menurut hasil penelitian Wismanto (2002), bahwa terdapat hubungan antara sikap dan perilaku. Sarwono (2002) menyatakan bahwa ciri khas dari sikap adalah mempunyai obyek tertentu (orang, perilaku, situasi, benda) juga mengandung penilaian setuju atau tidak setuju, suka tidak suka. Perbedaan terletak pada proses selanjutnya dan penerapan konsep tentang sikap mengenai proses terjadinya, sebagian besar pakar berpendapat bahwa sikap adalah sesuatu yang dipelajari (bukan bawaan). Oleh karena itu sikap lebih dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi dan diubah. Peter dan Olson (1996) *dalam* Wismanto (2002) mengartikan sikap sebagai evaluasi umum konsumen terhadap suatu obyek. Sedangkan Winkel (1991) mendefinisikan sikap adalah kecenderungan subyek menerima atau menolak suatu obyek berdasarkan penilaian terhadap obyek itu sebagai hal yang berguna (sikap positif) atau berguna (sikap negatif). Berdasarkan uraian Suranto (1997), sikap merupakan suatu kesiapan atau kecenderungan untuk bereaksi atau bertindak terhadap suatu obyek lingkungan tertentu berdasarkan penilaian atau penghayatan terhadap obyek yang bersangkutan. Jadi sikap dalam hal ini sebagai suatu kesiapan seseorang untuk merespon sesuatu. Dengan demikian sikap belum merupakan suatu tindakan atau perilaku melainkan berupa “pre-disposisi” tingkah laku. Selanjutnya dengan melihat adanya satu kesatuan serta hubungan atau keseimbangan dari sikap dan tingkah laku, maka kita harus

melihat sikap sebagai suatu sistem atau hubungan diantara komponen-komponen sikap.

Sikap memiliki komponen-komponen, dalam hal ini jika dilihat dari strukturnya, menurut Sears (1988), Azwar (1988), Winkel (1991), dan Rakhmat (1986) *dalam* Suranto (1997), sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Selanjutnya dijelaskan bahwa komponen kognitif berupa kepercayaan (seluruh kognisi) seseorang mengenai obyek sikap, komponen afektif merupakan komponen perasaan yang menyangkut aspek emosional seseorang terhadap obyek, dan komponen konatif merupakan kecenderungan berperilaku terhadap obyek.

Demikian halnya Secord dan Backman (1964) serta Rosenberg (Gibson *et al* 1984) *dalam* Suranto 1997 mengemukakan bahwa sikap mengandung tiga komponen meliputi:

1. Komponen kognitif yang mencakup pengetahuan, persepsi, kepercayaan, dan sebagainya. Kepercayaan evaluatif diwujudkan dalam bentuk kesan baik atau tidak baik, yang dimiliki seseorang terhadap suatu obyek.
2. Komponen afektif yaitu komponen emosional yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang. Rasa senang bersifat positif sedangkan rasa tidak senang bersifat negatif.
3. Komponen konatif berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap suatu obyek. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam tindakan (*overt behavior*). Untuk mewujudkannya sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor pendukung lain. Tingkat-tingkat tindakan/praktek, yaitu :
 - a. Persepsi (*perseption*)
Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama.
 - b. Respons Terpimpin (*guided respons*)
Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat dua.
 - c. Mekanisme (*mechanism*)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah mencapai praktek tingkat tiga.

d. Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan tersebut sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

- Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan seseorang menerapkan pengetahuan kedalam bentuk tindakan. Keterampilan seorang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Keterampilan juga merupakan kemampuan untuk memperoleh kompetensi cekat, cepat dan tepat dalam menghadapi permasalahan. Dalam hal ini, pembelajaran keterampilan dirancang sebagai proses komunikasi belajar untuk mengubah perilaku, melalui proses pembelajaran dan praktek. Perilaku terampil ini dibutuhkan dalam keterampilan hidup manusia di masyarakat (Notoadmojo, 1998).

Keterampilan merupakan kemampuan dalam menghubungkan sebab akibat, mentransformasi, serta menemukan hubungan dan memberikan kualifikasi, pemecahan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif (Presseisen, 1985 *dalam* Ikhsanuddin dan Widhiyanti, 2007). Keterampilan digunakan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan apa yang harus dilakukan, untuk menganalisis informasi dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan logis, memahami asumsi dan bias yang mendasari proses belajar (Liliasari, 2005 *dalam* Ikhsanuddin dan Widhiyanti, 2007). Indikator keterampilan dibagi menjadi lima kelompok (Presseisen, 1985 *dalam* Ikhsanuddin dan Widhiyanti, 2007) yaitu: memberikan penjelasan sederhana dalam praktek,

membangun keterampilan dasar, menyimpulkan hasil dalam praktek, membuat penjelasan lebih lanjut, serta mengatur strategi dan taktik.

2. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang banyak diketahui adalah anak-anak yang berusia 1-18 tahun, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan, baik untuk bermain maupun untuk mencari nafkah. Di antara mereka masih memiliki orang tua atau wali yang berkewajiban merawat mereka. Namun demikian kebiasaan, nilai-nilai, dan jaringan interaksinya sebagian besar tumbuh dan berkembang di jalanan.

Secara umumnya anak jalanan ini berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan cara kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan kehilangan kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Anak jalanan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar atau memenuhi kepentingan orang lain, dengan berbagai cara. Misalnya mengamen, mengemis, semir sepatu, ojek payung, dan berjualan makanan dan minuman.

Anak jalanan adalah sosok individu yang bersaing dengan orang-orang dewasa yang memiliki berbagai kepentingan. Fisik yang lebih kecil dan rentan, anak jalanan berhadapan dengan orang dewasa melalui caranya sendiri untuk mendapatkan uang. Kondisi jalanan yang serba keras, telah membentuk mereka dalam satu cara pandang dan cara memaknai yang berbeda dengan anak normal sebayanya. Mereka memiliki pengalaman yang berbeda dengan anak yang hidup dalam lingkungan atau keluarga standar.

Menurut Nurharjadmo dalam Bajari (2012: 18) mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 7-18 tahun, laki-laki dan perempuan yang bekerja di jalan raya atau tempat-tempat umum setiap hari. Mereka mungkin dari anak-anak yang sudah terpisah dengan keluarganya, masih mempunyai rumah, tetapi lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan dan dari keluarga yang hidup di jalan.

Departemen Sosial Republik Indonesia dalam Bajari (2012: 18-20) menyusun tiga kategori anak jalanan. Kategori tersebut didasarkan pada bentuk-bentuk strategi pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kluster anak jalanan. Terdapat tiga kategori anak jalanan yaitu:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*),
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*),
3. Anak rentan menjadi anak jalanan.

Pertama, anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*), yaitu anak jalanan dengan kriteria intensitas hubungan yang sangat rendah bahkan putus hubungan dengan orang tua. Berdasarkan segi waktu, delapan sampai 16 jam dalam sehari mereka menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja mencari nafkah dengan mengamen, mengemis maupun menggelandang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka juga putus hubungan dengan sekolah (*drop-out*).

Kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*), yang termasuk dalam kelompok ini memiliki karakteristik; intensitas hubungan dengan orang tua tidak teratur, waktu yang dihabiskan di jalanan dalam satu hari mencapai enam sampai delapan jam tiap hari, hidup di daerah kumuh, dengan cara mengontrak bersama dengan anak jalanan lainnya, putus hubungan dengan

sekolah (*drop-out*), dan mencari nafkah untuk mendapatkan uang dengan menjual koran, makanan dan minuman (pengasong), mencuci kendaraan, memungut barang bekas (pemulung) dan menyemir sepatu.

Ketiga, adalah anak rentan menjadi anak jalanan. Klasifikasi ini mengacu pada anak yang memiliki kriteria; intensitas pertemuan dengan orang tuanya teratur karena mereka masih tinggal dengan keluarganya (orang tua), empat sampai enam jam waktunya digunakan untuk bekerja di jalan, rata-rata masih bersekolah, dan melakukan berbagai aktivitas untuk mendapatkan uang dengan mengamen, menjual koran, dan menyemir sepatu.

Berdasarkan beberapa definisi anak jalanan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia antara 1-18 tahun yang beraktifitas dan mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan baik yang masih tinggal dengan keluarganya (orang tua) maupun yang sudah putus hubungan dengan keluarganya. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah dinas yang mengatasi masalah kesejahteraan sosial salah satunya adalah masalah anak jalanan. Pengertian anak-anak jalanan inilah yang nantinya akan diberikan pemberdayaan/pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik.

3. Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan

Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya dalam pemberdayaan anak jalanan. salah satu alternatif upaya yang seharusnya dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan anak jalanan adalah berkerja sama dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat rumah singgah untuk anak-anak jalanan.

Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedang secara khusus tujuan rumah singgah adalah :

- a. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai- nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Mengupayakan anak-anak kembali kerumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
- c. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif. (dalam <http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html>.)

Peran dan fungsi rumah singgah bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Secara ringkas fungsi rumah singgah dalam Bajari (2012: 41) antara lain:

- a. Sebagai tempat pertemuan (*meeting point*)
- b. Pekerja sosial dan anak jalanan. Dalam hal ini sebagai tempat untuk terciptanya persahabatan dan keterbukaan antara anak jalanan dengan pekerja sosial dalam menentukan dan melakukan berbagai aktivitas pembinaan.
- c. Pusat diagnosa dan rujukan. Dalam hal ini rumah singgah berfungsi sebagai tempat melakukan diagnosa terhadap kebutuhan dan masalah anak jalanan serta melakukan rujukan pelayanan sosial bagi anak jalanan.
- d. *Fasilitator* atau sebagai perantara anak jalanan dengan keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
- e. Perlindungan. Rumah singgah dipandang sebagai tempat berlindung dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menimpa anak jalanan dari kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.
- f. Pusat informasi tentang anak jalanan
- g. *Kuratif* dan *rehabilitatif*, yaitu fungsi mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak.
- h. Akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial.

- i. *Resosialisasi*. Lokasi rumah singgah yang berada ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu upaya mengenalkan kembali norma, situasi dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan.

Bentuk upaya yang seharusnya dilakukan dalam pemberdayaan anak jalanan selain melalui rumah singgah dapat juga dilakukan melalui program-program:

- a. *Center based program*, yaitu membuat penampungan tempat tinggal yang bersifat tidak permanen.
- b. *Street based interventions*, yaitu mengadakan pendekatan langsung di tempat anak jalanan berada atau langsung ke jalanan.
- c. *Community based strategi*, yaitu dengan memperhatikan sumber gejala munculnya anak jalanan baik keluarga maupun lingkungannya. (dalam <http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html>.)

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya yang dapat dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan anak jalanan adalah dengan cara mewujudkan tujuan pembinaan terhadap anak jalanan berupa usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi sosial. Upaya-upaya ini dapat didukung menggunakan penerapan prinsip-prinsip utama *good governance*, antara lain prinsip partisipasi, transparansi, responsif, efektivitas dan efisiensi.

C. Kerangka Pikir

Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga interaksi yang baik diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Penerapan prinsip *good governance* lebih menekankan pada prinsip partisipasi, transparansi, responsif, efektifitas dan efisiensi. Beberapa prinsip *good governance* ini di pilih penulis berdasarkan beberapa alasan yaitu pertama, memilih transparansi dimana penulis ingin meneliti apakah ada lembaga lain yang ikut serta berpartisipasi membantu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan. Selanjutnya alasan memilih prinsip transparansi, penulis ingin meneliti apakah sudah tersedianya informasi yang memadai dan mudah di akses oleh masyarakat umum terhadap setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan program pemberdayaan terhadap anak jalanan.

Selanjutnya alasan memilih prinsip responsif yaitu penulis ingin meneliti bagaimana daya tanggap Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani langsung masalah anak jalanan. Alasan selanjutnya memilih prinsip efektifitas dan efisiensi yaitu penulis ingin meneliti apakah kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan baik dalam pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana sudah sesuai dan tepat waktu. Berdasarkan alasan beberapa prinsip di atas, dapat di lihat apakah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah menerapkan ke empat prinsip *good governance* tersebut atau belum. Sehingga dapat di tarik kesimpulan apakah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan sudah dapat di katakan *good governance* atau bahkan jauh dari kata *good governance*.

Konsep *good governance* ini muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penerapan prinsip *good governance* ini dilakukan karena selama ini kinerja

pemerintahan yang dilakukan masih kurang efektif terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. Salah satu bidang kesejahteraan sosial yaitu pada instansi Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan anak jalanan.

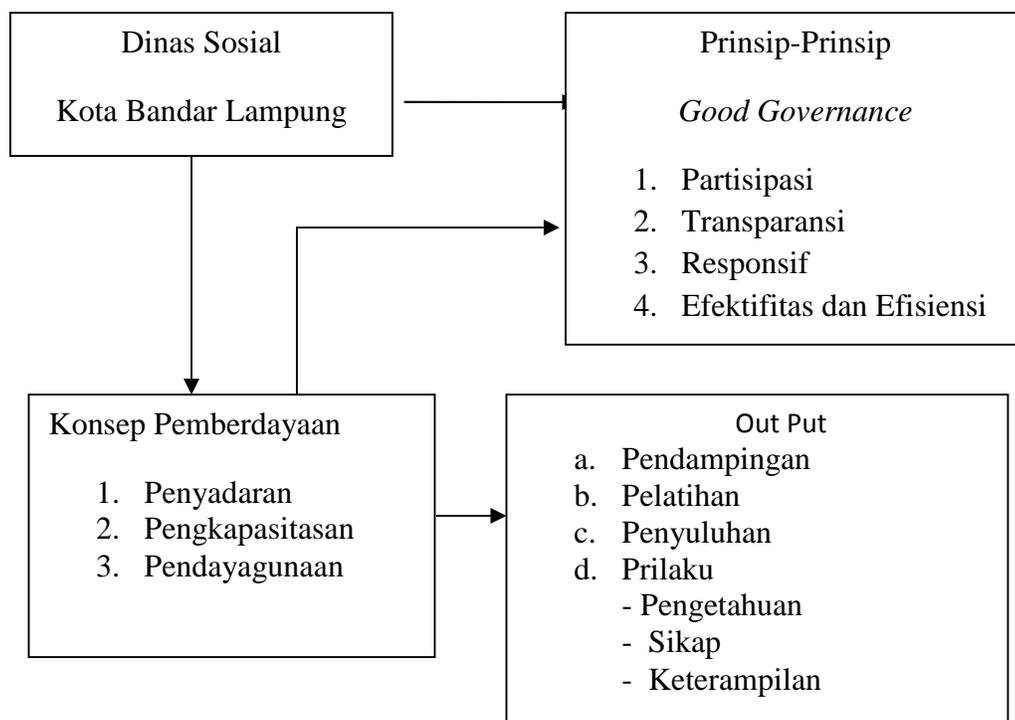
Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang masih banyak anak terlantar dijalan di kota-kota, salah satunya adalah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan tingginya jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung, maka Walikota Bandar Lampung mengeluarkan peraturan UU No. 15 tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menjadi instansi daerah yang mana mempunyai tugas dan wewenang di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada walikota. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan unsur pemerintah daerah yang memiliki fungsi dan tugas dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang kesejahteraan sosial, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.

Anak jalanan adalah anak yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Untuk itu, mereka perlu diberdayakan melalui demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, partisipasi politik, serta pendidikan luar sekolah.

Anak jalanan, pada hakikatnya, adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup

memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan.

Berdasarkan hal di atas penulis ingin meneliti bentuk-bentuk upaya pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemberdayaan/pembinaan anak jalanan. Selanjutnya apakah penerapan prinsip *good governance* yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sudah sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi, responsif, efektifitas dan efisiensi yang ada atau sebaliknya penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut belum sesuai dan tidak berjalan dengan baik. Sehingga diakhir penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan prinsip *good governance* pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan/pembinaan anak jalanan. Untuk baik dan jelasnya dapat di lihat pada gambar 2 di bawah ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang di dasarkan pada data kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan anak jalanan dan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Menurut Moh. Nazir (2003: 37) menjelaskan :

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan dalam meneliti atau menganalisis status kelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah mempelajari dan menggambarkan keadaan organisasi, data-data yang dimiliki organisasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta hubungan antara fenomena yang diteliti”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bersifat kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membatasi studi dan bidang kajian penelitian, karena tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan komponen penerapan prinsip *good governance* pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan anak jalanan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada beberapa prinsip *good governance* diantaranya yaitu prinsip partisipasi, transparansi, responsif, efektifitas dan efisiensi.

Beberapa prinsip *good governance* ini di pilih penulis berdasarkan beberapa alasan yaitu:

1. Partisipasi, penulis ingin meneliti apakah ada lembaga lain yang ikut serta berpartisipasi membantu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan.
2. Transparansi, penulis ingin meneliti apakah sudah tersedianya informasi yang memadai dan mudah di akses oleh masyarakat umum terhadap setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan program pemberdayaan terhadap anak jalanan.
3. Responsif, penulis ingin meneliti bagaimana daya tanggap Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani langsung masalah anak jalanan yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat.
4. Efektifitas dan Efisiensi, penulis ingin meneliti apakah kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan baik dalam pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana sudah sesuai dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, apabila Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan sudah menerapkan ke empat prinsip *good governance* tersebut maka ke empat prinsip tersebut sudah cukup untuk menjelaskan apakah dinas sosial kota bandar lampung dapat di katakan *good governance* atau bahkan jauh dari kata *good governance*.

C. Jenis Data

Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yaitu:

1. Data Primer merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yang diperoleh oleh pihak berkompeten dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang terpenting dalam penelitian ini, data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berupa data-data yang berasal dari artikel-artikel dan karya ilmiah yang dipublikasikan di internet serta berbagai literatur yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, artikel dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis, dalam penelitian ini digunakan prosedur sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan kegiatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek pengamatan dilapangan dan rumah singgah anak jalanan. Penelitian ini melakukan observasi terhadap

penerapan prinsip *good governance* pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan anak jalanan. Metode ini adalah untuk memperoleh data yang lebih rinci dan lengkap dengan menggunakan pengamatan secara seksama dengan cara melibatkan diri pada komunitas tanpa berpartisipasi dalam fokus penelitian yang sedang diteliti. Observasi diklasifikasikan menjadi tiga cara yaitu: (1) bertindak sebagai partisipan dan nonpartisipan, (2) dilakukan secara terus terang dan (3) dilakukan dengan latar alami. Metode ini digunakan sebagai studi observasi untuk menuliskan catatan-catatan lapangan dalam mengambil gambar lokasi yang menjadi objek penelitian. Pengambilan data melalui metode observasi ini untuk mengontrol hasil wawancara dan dokumentasi yang telah disebutkan di atas, tanpa menjadi partisipan dalam kegiatan-kegiatan yang sedang di observasi.

2. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan data pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan, dengan menggunakan panduan wawancara dan jawaban-jawaban informan akan dicatat. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditetapkan sebelumnya, informan dapat memberikan informasi secara langsung sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Interview atau wawancara dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman interview yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan suasana tidak formal. Dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku.⁵¹ Informan dalam penelitian ini adalah anak jalanan, ketua rumah singgah dan relawan pendamping dalam program tersebut. Dalam menggali hasil yang maksimal peneliti melakukan

wawancara mendalam dengan banyak menghasilkan informasi tambahan sebagaimana data penunjang dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu ditulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa, dan melampirkan foto-foto dokumentasi penelitian. Kemudian, metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa buku tentang proses pemberdayaan masyarakat, catatan kaki penulis selama dilapangan, surat kabar atau Koran yang berkaitan dengan anak jalanan, dan draft undang-undang (UU) tentang anak jalanan dan program pemberdayaan bagi masyarakat. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum serta kondisi riil mengenai hasil pengelolaan perikanan dalam program tersebut.

E. Informan

Informan adalah sumber penting yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data melalui wawancara. Ada beberapa informan yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini. Informan-informan tersebut di pilih berdasarkan tiga syarat menjadi informan, yaitu: Informan tersebut adalah orang yang sedang berkecimpung dengan aktifitas yang akan penulis teliti, informan tersebut adalah orang yang pernah terlibat dan orang yang mengamati masalah yang akan penulis teliti.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kota Bandar Lampung.
2. Pengelolah rumah singgah (Yayasan AL-Achyar).

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah dengan mengolah data tersebut. Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Menurut Burhan Bungin (2010: 144) editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data kelengkapan jawaban, kejelasannya, dan relevansinya atau kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan.

2. Intepretasi Data

Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan suatu imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan

dalam penalaran sesuatu. Proses analisis data kualitatif melalui proses sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB IV.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Pembentukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung, telah berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan Perda tersebut, diatur rincian tugas masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 24 tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Dengan adanya Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung kemudian mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah: “Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat”.

Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud:

1. Meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
2. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
3. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.

4. Terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Letak Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sangat strategis yaitu terletak di Jl. Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat, yang termasuk jalan protokol.

B. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, disebutkan bahwa Sususnan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Sub Bagian Tata Usaha
4. Subdin Bina Program
5. Subdin Bina Kesejahteraan Sosial
6. Subdin Rehabilitasi Sosial
7. Subdin Bantuan Sosial
8. Subdin Pemberdayaan Perempuan
9. Unit Pelaksanaan Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi di atas, masalah anak jalanan ditangani oleh Subdin Bina Kesejahteraan Sosial dan Subdin Rehabilitasi Sosial tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Subdin Bina Kesejahteraan Sosial

Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan tugas kebijakan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial anak balita, keluarga dan lanjut usia, pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta pembinaan karang taruna, bimbingan sosial dan kegiatan keagamaan dan pemberdayaan dunia usaha untuk partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial, pendayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
- b. Penetapan kriterian dan prosedur pelayanan di bidang kesejahteraan sosial anak, keluarga dan lanjut usia, pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuanganserta pembinaan karang taruna, bimbingan sosial dan kegiatan keagamaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial anak, keluarga dan lanjut usia, pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta pembinaan karang taruna, bimbingan sosial dan kegiatan keagamaan.

- d. Penyelenggaraan koordinasi penelitian dan uji coba pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial dan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- e. Penyelenggaraan penelitian tenaga di bidang usaha kesejahteraan keluarga.

Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Kesejahteraan Anak, dan Jompo

Seksi Kesejahteraan Anak, dan Jompo mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan anak terlantar dan penanganan anak jalanan baik di dalam maupun di luar panti.
- 2) Melaksanakan pelayanan kesejahteraan anak yatim dan piatu, anak balita melalui penitipan anak dan adopsi.
- 3) Menyelenggarakan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial keluarga.
- 4) Pembinaan terhadap keluarga yang bermasalah sosial psikologis.
- 5) Peningkatan kesejahteraan sosial terhadap pemulung.
- 6) Bimbingan fisik, mental, sosial kesehatan, rekreasi dan berbagai kemudahan bagi lanjut usia dan jompo.
- 7) Bantuan/stimulan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).
- 8) Bantuan sosial pengembangan lembaga kesejahteraan lanjut usia, rumah singgah dan panti sosial asuh anak.
- 9) Penyuluhan sosial.
- 10) Penangan masalah pemukiman kumuh.

- 11) Penyeleksian kelayakan rumah singgah dan PSAA (Panti Sosial Asuhan Anak) dalam rangka penerimaan bantuan sosial.
- 12) Menyelenggarakan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial.

2. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub Dinas Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna susila serta pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba.
- b. Penetapan kriteria dan prosedur di bidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna susila serta pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba.
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna susila serta pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba.
- d. Pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

C. Data Kepegawaian

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Kedudukan dan Jabatan Struktural Personil Pegawai Dinas Sosial sebanyak 21 Orang

D. Gambaran Umum Anak Jalanan

Definisi anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 6-18 tahun yang beraktiftas dijalan minimal 4 jam/hari. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh anak jalanan ini seperti pedagang koran, pengemis, pengamen, pedagang plastik di pasar, pedagang asongan, penyemir sepatu, ojek payung dan sebagainya. keberadaan anak jalanan ini juga bersifat eksodus, yaitu tidak menetap disatu daerah saja, mereka sering berpindah-pindah daerah. Adapun klasifikasi anak jalanan ini adalah:

1. Tipe 1: anak jalanan bekerja dijalan, bersekolah, kembali kerumah dan masih memiliki orang tua.
2. Tipe 2: anak jalanan bekerja dijalan, tidak bersekolah, jarang pulang kerumah, dan masih memiliki orang tua.
3. Tipe 3: anak jalanan yang benar-benar hidup dijalan, sudah tidak punya orang tua dan tempat tinggal.

Keberadaan anak jalanan sering bersinggungan dengan keamanan dan kenyamanan. Anak-anak jalanan juga sering mengalami eksploitasi, namun eksploitasi paling sering dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Keselamatan mereka di jalan juga menjadi dampak paling serius, mereka rawan terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap tindak pemerasan, rawan kecelakaan lalu lintas, rawan terhadap pelecehan seksual, rawan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang secara bebas dan sebagainya. Keberadaan anak jalanan juga sering mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta keindahan kota.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa penerapan *good governance* pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan sudah sesuai dengan indikator *good governace* .

1. Penerapan prinsip partisipasi berupa partisipasi pihak yang terkait dalam pembinaan anak jalanan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dinas Sosial sebagai *leading sektor* kegiatan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2010. Partisipasi rumah singgah yang pada penelitian ini menggunakan Yayasan Al Achyar sudah melakukan partisipasi berupa penampungan dan pembinaan anak jalanan.
2. Penerapan prinsip transparansi berupa kegiatan pembinaan anak jalanan sudah memenuhi syarat transparansi berupa keterbukaan informasi tentang pencegahan dan pembinaan anak jalanan serta penyampaian informasi tentang undang – undang perlindungan dan eksploitas Anak melalui pembuatan banner dan baliho.
3. Penerapan prinsip responsif berupa kegiatan pencegahan dan pembinaan anak jalanan sudah mendapat respon dari pihak terkait seperti Dinas Sosial, Rumah Singgah, Sat Pol PP, anak Jalanan itu sendiri dan insan Pers dalam hal penyampaian informasi ke publik.
4. Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi, pada prinsip ini berupa pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pembinaan anak jalanan

kurang optimal hal ini terkendala dengan adanya hambatan – hambatan berupa anak jalanan yang berada di rumah singgah belum sepenuhnya meninggalkan pekerjaannya. Tapi kendala ini menjadi tantangan ke depan Dinas Sosial dan stake holder lainnya dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan.

B. Saran

1. Kepada Pihak Dinas Sosial

Hendaknya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan penanganan anak jalanan menggunakan prinsip *good governance* berupa efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan kegiatan sehingga dana yang dikeluarkan dalam penanganan anak jalan berupa tepat dalam penggunaan dana dan tepat sasaran dalam kegiatan

2. Pihak lain

- a. Rumah singgah hendaknya memberikan jaminan agar anak jalanan tersebut tidak kembali ke pekerjaannya
- b. Rumah singgah hendaknya memberikan informasi dan capaian kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat umum

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Edy Topo dan Desi, Fernanda. 2001. *Membangun Pemerintahan Yang Baik*. LAN-RI. Jakarta.
- Bajari, Atwar. 2012. *Anak Jalanan, Dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak Menyimpang*. Humaniora. Bandung.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Edisi 1, Kybernology*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Makhya, Syarief. 2004. *Ilmu Pemerintahan: Telaah Awal (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2012. *Bagian Pertama, Edisi Revisi: Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.
- _____.2012. *Bagian Kedua, Edisi Revisi: Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju. Bandung.

_____.2012. *Bagian Ketiga, Edisi Revisi: Good Governance dan Good Corporate Governance*. Mandar Maju. Bandung.

Dokumen :

Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara.

Sumber lain :

http://www.bappenas.go.id/introction_gg.asp.htm
Diakses pada tanggal 24 Januari 2014.

http://www.transparansi.or.id/agenda/agenda2/seri_dialog/dialog-32.html
Diakses pada tanggal 24 Januari 2014.

http://www.transparansi.or.id/agenda2/seri_dialog/dialog-32.html
Diakses pada tanggal 24 Januari 2014.

<http://www.anjal.blogdrive.com/archive/11.html>
Diakses pada tanggal 11 Febuari 2014.

<http://www.ciptamukti.blogspot.com/2011/12/pemberdayaan-masyarakat.html>
Diakses pada tanggal 17 Febuari 2014.